ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Dirupsi Penghidupan: Dampak Ekonomi Politik Sengketa Lahan di Bara-Baraya Makassar

M Yusrifar[1], Hulwana Ahsyani[2], Bayu Pratama[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: myusrifarjafar12@gmail.com[1], wannajaya19@gmail.com[2], wannajaya19@gmail.com[3]

Article History:
Received: 02 November 2026
Revised: 03 November 2026
Accepted: 04 November 2026

Keywords: *Ancaman Penggusuran, Stres Lingkungan Kronis, Disrupsi Mata Pencaharian, Kesejahteraan Multidimensional, Keadilan Spasial, Bara-Baraya.*

Abstrak: *Sengketa tanah di kawasan perkotaan sering kali dipandang sebatas kontestasi klaim hukum formal dan nilai ganti rugi material, sehingga mengabaikan dampak psikososial yang dialami oleh warga terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ancaman penggusuran bekerja sebagai stresor lingkungan kronis (chronic environmental stressor) yang memicu disrupsi mata pencaharian (livelihood) serta meruntuhkan kesejahteraan hidup (well-being) warga di Kelurahan Bara-Baraya, Kota Makassar. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan pisau analisis ekonomi politik perkotaan dan psikologi lingkungan, data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap warga terdampak, pendamping komunitas, dan aktivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman penggusuran berkepanjangan menciptakan kecemasan kronis, trauma kolektif, dan hilangnya sense of control akibat rusaknya keterikatan tempat (place attachment). Tekanan psikologis ini berimplikasi langsung pada kelumpuhan pengambilan keputusan ekonomi (economic decision-making paralysis), di mana pelaku usaha mikro enggan melakukan akumulasi modal dan perbaikan usaha. Di samping itu, kelelahan mental menurunkan kapasitas kognitif serta produktivitas buruh harian, sekaligus mengikis modal sosial (social capital) yang selama ini menjadi jaring pengaman informal komunitas. Kumulasi dari ketegangan psikis dan kelumpuhan ekonomi harian ini bermuara pada kemerosotan kesejahteraan hidup secara multidimensional, yang termanifestasi dalam bentuk timbulnya penyakit psikosomatis, meningkatnya beban pengeluaran medis, hingga keterjeratan warga dalam kemiskinan struktural baru (new urban poverty). Penelitian ini menyimpulkan pentingnya pergeseran paradigma penataan ruang perkotaan di Kota Makassar menuju pemenuhan keadilan spasial (spatial justice) yang*

memprioritaskan kepastian hak atas tanah dan perlindungan psikososial masyarakat kelas bawah.

PENDAHULUAN

Dinamika pembangunan perkotaan modern di kawasan berkembang makin menunjukkan pergeseran fungsi ruang dari basis sosial-penghidupan (use value) menuju komoditas ekonomi yang diperdagangkan demi akumulasi keuntungan (exchange value) (Lefebvre, 1991; Harvey, 2001). Di kawasan perkotaan sekunder yang bertumbuh pesat seperti Kota Makassar, percepatan akumulasi modal menuntut penyediaan ruang-ruang baru untuk ekspansi sektor komersial, bisnis properti, dan infrastruktur pendukung (Brenner et al., 2012). Konsekuensi langsung dari ekspansi ini adalah meningkatnya tekanan ekonomi terhadap kawasan permukiman padat di pusat kota yang secara geografis bernilai strategis (Hackworth, 2007). Ketika harga tanah melambung tinggi, kawasan padat penghuni kelas pekerja kerap dipandang oleh logika pasar neoliberal sebagai "ruang yang tidak efisien" secara finansial, sehingga memicu dorongan alih fungsi lahan dan praktik perampasan ruang perkotaan (urban land grabbing) (Sassen, 2014; Steel et al., 2017).

Laju pembangunan dan ekspansi komersial di Kota Makassar telah menempatkan tanah perkotaan sebagai komoditas ekonomi yang sarat dengan kepentingan spekulatif. Transmisi fungsi tanah dari nilai guna (use value) sebagai ruang hidup dan reproduksi sosial menjadi nilai tukar (exchange value) menciptakan ketegangan struktural antara pemodal dan warga pemukiman padat. Fenomena komodifikasi ruang ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu oleh Harvey (2008) mengenai accumulation by dispossession, yang menegaskan bahwa kapitalisme perkotaan senantiasa menyerap kelebihan modal melalui pengambilalihan ruang-ruang hidup masyarakat kelas bawah. Kawasan Bara-Baraya, yang terletak di lokasi sangat strategis di pusat Kota Makassar, menjadi salah satu lanskap konflik agraria perkotaan paling krusial. Sengketa lahan yang berkepanjangan di kawasan ini tidak hanya memicu benturan klaim hukum kepemilikan formal, melainkan juga menghadirkan bayang-bayang ancaman penggusuran paksa secara terus-menerus bagi masyarakat setempat.

Ancaman penggusuran di Bara-Baraya bukan sekadar peristiwa fisik atas pembongkaran bangunan, melainkan bentuk tekanan lingkungan kronis (chronic environmental stressor) yang secara langsung merusak kondisi psikis warga. Studi empiris dari Fullilove (2004) mengenai rootshock menemukan bahwa penggusuran atau ancaman kehilangan tempat tinggal secara paksa merusak ekosistem emosional dan memicu trauma psikologis kolektif yang mendalam akibat terputusnya ikatan sosial-spasial. Penelitian ini diperkuat oleh temuan Desmond dan Kimbro (2015) yang menguji dampak ketidakpastian hunian terhadap kesehatan mental, di mana ancaman kehilangan rumah terbukti meningkatkan prevalensi depresi dan kecemasan kronis secara signifikan. Dalam kasus Bara-Baraya, kondisi kecemasan eksistensial ini terus membayangi kehidupan harian warga, menghancurkan rasa aman (sense of security), dan menciptakan keletihan mental (mental fatigue) yang berlarut-larut.

Dampak psikologis dari ancaman penggusuran ini secara langsung menurunkan produktivitas kerja serta merusak jaring pengaman sosial-ekonomi lokal. Bagi warga Bara-Baraya yang mengandalkan stamina dan fokus harian, kelelahan mental serta waktu yang tersedot untuk konsolidasi warga atau menghadiri proses hukum berujung pada penurunan kinerja yang drastis. Lebih jauh lagi, penelitian Woolcock dan Narayan (2000) tentang modal sosial (social capital) mencatat bahwa ketidakpastian komunitas dapat mengikis kepercayaan sosial (social trust); di Bara-Baraya, ancaman penggusuran merenggangkan sistem kredit informal, arisan, dan mekanisme utang warung yang selama ini menjadi jaring pengaman mandiri warga saat krisis.

Kumulasi dari tekanan psikologis dan disrupsi mata pencaharian pada akhirnya mengakibatkan kemerosotan kesejahteraan hidup (well-being) warga secara multidimensional. Pemindahan paksa atau bayang-bayang ancaman relokasi ke wilayah pinggiran kota secara langsung memicu timbulnya kemiskinan perkotaan baru (new urban poverty) akibat pembengkakan biaya transportasi (cost of distance) menuju pusat aktivitas kerja di tengah kota. Selain dampak finansial berupa penurunan pendapatan, stres lingkungan yang dialami warga secara berkepanjangan juga termanifestasi secara nyata menjadi berbagai gangguan kesehatan fisik dan penyakit psikosomatis, seperti hipertensi, insomnia, dan penurunan daya tahan tubuh. Di Bara-Baraya, kemerosotan kondisi kesehatan fisik ini berujung pada membengkaknya beban pengeluaran medis rumah tangga, yang pada akhirnya semakin memperdalam penderitaan ekonomi dan sosial warga terdampak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah bagaimana ancaman penggusuran bekerja sebagai stresor psikologis yang memicu disrupsi mata pencaharian (livelihood) serta meruntuhkan kesejahteraan hidup (well-being) warga terdampak sengketa lahan di Bara-Baraya. Melalui sintesis antara pendekatan ekonomi politik perkotaan dan psikologi lingkungan, penelitian ini berupaya mengisi celah literatur yang selama ini cenderung melihat sengketa tanah sebatas pada dimensi klaim hukum formal dan nilai ganti rugi material semata. Diharapkan, temuan empiris dari studi ini dapat memberikan sudut pandang baru bagi pemangku kebijakan di Kota Makassar untuk menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan spasial (spatial justice), yang memprioritaskan perlindungan kesehatan mental serta keberlanjutan ekonomi rakyat di atas kepentingan akumulasi modal spekulatif.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Akumulasi Melalui Deprivasi dan Rent Gap

Secara makro, penelitian ini berpijak pada konsep akumulasi melalui deprivasi (accumulation by dispossession) dari David Harvey (2003, 2008) serta teori jurang sewa lahan (rent gap theory) yang dipelopori oleh Neil Smith (1979, 1987). Harvey menjelaskan bahwa akumulasi modal dalam sistem kapitalisme perkotaan tidak hanya terjadi melalui ekspansi produksi pasar bebas, melainkan sering kali dilakukan melalui pengambilalihan, komodifikasi, dan perampasan ruang hidup masyarakat kelas bawah demi menyerap kelebihan modal (surplus capital) di sektor properti. Dalam konteks perkembangan perkotaan, mekanisme ini menempatkan lahan bukan lagi sebagai ruang sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga, melainkan sebagai aset finansial spekulatif yang berpusat pada perolehan nilai tukar (exchange value) setinggi-tingginya.

Proses komodifikasi dan perampasan ruang tersebut didorong oleh tingginya rent gap, yaitu lebarnya jurang antara nilai sewa tanah aktual (actual ground rent) yang dihasilkan dari penggunaan pemukiman padat saat ini dengan potensi nilai sewa tanah tertinggi (potential ground rent) jika kawasan tersebut dikembangkan secara komersial (Smith, 1996). Ketika kawasan pemukiman rakyat berada di lokasi yang sangat strategis di pusat kota, timbul insentif ekonomi yang sangat besar bagi para spekulan tanah dan pemodal untuk menguasai lahan tersebut. Sebagaimana ditunjukkan dalam studi pertanahan perkotaan di Indonesia (Batubara & Rachman, 2022; Lees et al., 2016), ketergiuran atas nilai potential ground rent ini mendorong pemanfaatan celah hukum dan legalitas formal untuk menggeser pemukiman padat menjadi kawasan bisnis modern.

Implikasi dari dinamika rent gap dan akumulasi modal ini berdampak langsung pada terancamnya keberlanjutan pemukiman warga di Bara-Baraya, Makassar. Penetrasi modal spekulatif yang berusaha mengejar keutuhan nilai tanah potensial mengabaikan fakta sejarah

penguasaan fisik lahan serta fungsi sosial tanah bagi reproduksi ekonomi harian warga (Lefebvre, 1991; Rachman, 2017). Akibatnya, benturan kepentingan antara fungsi sosial tanah dan ekspansi modal menciptakan ketegangan struktural yang mewujud dalam bentuk ancaman penggusuran berkepanjangan. Kondisi ini menempatkan masyarakat kelas bawah pada posisi yang sangat rentan terhadap pengasingan spasial (spatial dispossession) dan kemerosotan kesejahteraan hidup.

Stres Lingkungan Kronis dan *Place Attachment*

Untuk membedah dimensi psikologis masyarakat terdampak, penelitian ini menerapkan teori stres lingkungan (*environmental stress theory*) yang dikembangkan oleh Evans dan Cohen (1987) serta konsep keterikatan tempat (*place attachment*). Mengacu pada pemikiran Altman dan Low (1992), rumah dan lingkungan permukiman sekitar tidak sekadar berfungsi sebagai struktur fisik atau tempat bernaung, melainkan sebagai ruang aman (*safe space*) yang membentuk identitas sosial, memori kolektif, dan stabilitas emosional individu. Keterikatan emosional dan spasial yang mendalam ini menjadi fondasi psikologis utama bagi warga dalam membangun rasa aman (*sense of security*) serta kepastian dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Relph, 1976; Gifford, 2014).

Namun, adanya ancaman penggusuran secara langsung merusak keterikatan tempat tersebut dan menciptakan kondisi ketidakpastian yang berlarut-larut (*prolonged precarity*). Sebagaimana dijelaskan dalam studi Fullilove (2004) mengenai *rootshock*, ancaman atau tindakan pemindahan paksa dari ruang hidup secara mendadak menghancurkan ekosistem psikososial warga dan memicu trauma psikologis kolektif. Ketakutan konstan akan kehilangan tempat tinggal merenggut rasa kendali individu atas lingkungannya, sehingga memicu kecemasan eksistensial, ketegangan emosional yang intens, dan gangguan kecemasan berkepanjangan (Desmond & Kimbro, 2015).

Dalam jangka panjang, tekanan lingkungan kronis (*chronic environmental stressor*) ini termanifestasi dalam bentuk kelelahan mental (*mental fatigue*) dan penurunan kesehatan mental warga secara menyeluruh (Lazarus & Folkman, 1984). Keadaan stres kronis yang dialami warga Bara-Baraya tidak hanya menguras energi emosional, tetapi juga mengganggu kapasitas kognitif harian mereka dalam mengambil keputusan penting bagi keluarga (Mani et al., 2013). Akibatnya, disintegrasi hubungan psikologis antara warga dan ruang hidupnya tidak hanya merusak kesejahteraan emosional, tetapi juga melemahkan daya tahan sosial dan ekonomi mereka dalam menghadapi konflik pertanahan yang sedang berlangsung.

Sustainable Livelihoods Framework

Dampak psikologis tersebut selanjutnya dihubungkan secara sistemik dengan kerangka kerja modal penghidupan (*livelihood assets*) yang dikembangkan oleh Department for International Development (DFID, 1999) serta Chambers dan Conway (1992). Dalam kerangka ini, stabilitas psikis dan kesehatan emosional diposisikan sebagai bagian terintegrasi dari modal manusia (*human capital*), yang menjadi fondasi utama bagi individu untuk menggerakkan jenis modal lainnya (Moser, 1998). Stabilitas mental yang tangguh memungkinkan masyarakat kelas bawah mengoptimalkan keterampilan, tenaga kerja harian, serta kapasitas adaptasi ekonomi mereka dalam menghadapi guncangan lingkungan maupun ketidakpastian struktur perkotaan (Ellis, 2000).

Ketika kondisi mental warga terganggu akibat ancaman penggusuran berkepanjangan, kapasitas kognitif dan fisik warga untuk mengelola modal finansial, fisik, dan sosial mengalami kemerosotan secara drastis (Mani et al., 2013). Kelelahan emosional dan kecemasan kronis memicu paralisis dalam pengambilan keputusan ekonomi, menurunkan produktivitas usaha harian, serta merenggangkan jaringan solidaritas dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang selama ini menjadi jaring pengaman informal komunitas (Woolcock & Narayan, 2000). Terkikisnya integrasi antar-modal penghidupan ini pada akhirnya meruntuhkan daya tahan ekonomi rumah tangga dan memicu

penurunan tingkat kesejahteraan hidup (*well-being*) warga secara menyeluruh (Scoones, 1998; Bebbington, 1999).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan pisau analisis ekonomi politik perkotaan (urban political economy). Pendekatan ini dipilih untuk membedah secara mendalam struktur relasi kuasa, komodifikasi ruang, serta implikasi sosial-ekonomi dari dinamika pertanahan perkotaan di tingkat mikro (Lefebvre, 1991; Creswell & Creswell, 2018). Penelitian dilaksanakan secara spesifik di kawasan pemukiman warga terdampak sengketa lahan di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive sampling) berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat yang tergolong tinggi, posisi geografis kawasan yang bernilai ekonomi strategis di pusat kota, serta durasi konflik pertanahan yang telah berlangsung lama dan memicu ancaman penggusuran secara terus-menerus (Neuman, 2014; Rachman, 2017).

Seluruh data dalam penelitian ini berfokus pada penghimpunan data primer yang bersumber langsung dari para aktor dan subjek terdampak di lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) yang berpedoman pada daftar pertanyaan terbuka (semi-structured interview) serta observasi partisipatif di lingkungan tempat tinggal warga (Yin, 2018). Subjek wawancara ditentukan secara bermakna, meliputi warga terdampak langsung yang mewakili berbagai profesi informal, serta para pendamping komunitas dan aktivis lingkungan. Fokus materi wawancara dan observasi diarahkan untuk menggali pengalaman subjektif terkait kecemasan psikologis harian, dinamika perubahan pola pencarian nafkah, fluktuasi dan penurunan pendapatan rumah tangga, serta dampak akumulatif dari ancaman penggusuran terhadap keharmonisan dan stabilitas ekonomi domestik warga.

Teknik analisis data dilaksanakan secara interaktif dan berkesinambungan mengacu pada model analisis kualitatif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Tahapan analisis diawali dengan reduksi data, yaitu mengategorikan, menyeleksi, dan mengodekan (coding) transkrip wawancara serta catatan lapangan terkait indikator stres psikologis dan kerentanan ekonomi. Selanjutnya dilakukan penyajian data (data display) yang disusun ke dalam matriks sintesis untuk memetakan hubungan kausalitas antara tingkat tekanan psikologis warga dan dampaknya terhadap komponen modal penghidupan (livelihood assets). Untuk menjaga keabsahan data (trustworthiness), penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan kesaksian antar-informan serta mengonfirmasikannya melalui hasil observasi kondisi fisik lapangan (Denzin, 2017). Seluruh temuan empiris tersebut kemudian dianalisis secara kritis menggunakan integrasi kerangka teori ekonomi politik perkotaan dan psikologi lingkungan guna menghasilkan kesimpulan yang sahih dan mendalam.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman penggusuran di Bara-Baraya telah menciptakan ketidakpastian hidup (prolonged precarity) yang mendalam bagi warga terdampak. Ketakutan akan kedatangan juru sita atau eksekusi lahan secara mendadak menimbulkan kecemasan kronis dan gangguan tidur di tingkat individu maupun komunitas. Rumah yang semula berfungsi sebagai ruang aman (safe space) dan pusat reproduksi sosial berubah menjadi sumber ancaman psikologis. Kondisi ini memicu munculnya trauma kolektif dan perasaan terasing di tanah sendiri, di mana warga kehilangan rasa kendali (sense of control) atas masa depan hidup mereka.

Tekanan psikologis yang dialami warga berimplikasi langsung pada kelumpuhan keputusan

ekonomi (*economic decision-making paralysis*). Warga yang memiliki usaha ekonomi mikro (seperti warung kelontong, usaha kuliner, dan perbengkelan) enggan melakukan renovasi tempat usaha, menambah stok barang, atau memperluas jaringan pasar karena bayang-bayang kerugian finansial akibat penggusuran. Rasa cemas yang terus-menerus ini menahan akumulasi modal skala kecil dan memaksa warga bertahan dalam aktivitas ekonomi yang sangat minimalis. Di sisi lain, kelelahan mental dan waktu yang tersedot untuk mengurus konflik pertanahan menurunkan kapasitas kognitif serta produktivitas kerja warga secara signifikan. Bagi buruh harian dan pekerja informal, penurunan fokus dan stamina akibat stres berujung pada berkurangnya jam kerja efektif dan hilangnya kesempatan meraih pendapatan harian.

Dampak ancaman penggusuran di Bara-Baraya dapat dilihat dari kelelahan mental dan waktu yang tersedot untuk mengurus konflik pertanahan menurunkan kapasitas kognitif serta produktivitas kerja warga secara signifikan. Bagi buruh harian dan pekerja informal, penurunan fokus dan stamina akibat stres berujung pada berkurangnya jam kerja efektif dan hilangnya kesempatan meraih pendapatan harian. Dampak ini dirasakan secara nyata oleh salah satu korban yang menuturkan:

"Kondisi ancaman ini membuat suami saya tidak fokus di tempat kerjanya, bahkan sampai dia sering terlambat karena begadang untuk jaga malam hari, ya akhirnya dia dipecat dari tempat kerjanya dan sekarang jadi buruh lepas saja sehari hari".

Tekanan psikologis yang dialami warga berimplikasi langsung pada kelumpuhan keputusan ekonomi (*economic decision-making paralysis*). Warga yang memiliki usaha ekonomi mikro (seperti warung kelontong, usaha kuliner, dan perbengkelan) enggan melakukan renovasi tempat usaha, menambah stok barang, atau memperluas jaringan pasar karena bayang-bayang kerugian finansial akibat penggusuran. Rasa cemas yang terus-menerus ini menahan akumulasi modal skala kecil dan memaksa warga bertahan dalam aktivitas ekonomi yang sangat minimalis. Di sisi lain, kelelahan mental dan waktu yang tersedot untuk mengurus konflik pertanahan menurunkan kapasitas kognitif serta produktivitas kerja warga secara signifikan. Bagi buruh harian dan pekerja informal, penurunan fokus dan stamina akibat stres berujung pada berkurangnya jam kerja efektif dan hilangnya kesempatan meraih pendapatan harian.

Kesaksian tersebut memperlihatkan secara gamblang bagaimana ancaman penggusuran merembet dan merusak bagian paling vital dalam kehidupan sehari-hari warga: mata pencaharian untuk menyambung hidup. Kewajiban ronda malam untuk menjaga dari potensi eksekusi mendadak memaksa warga mengorbankan waktu istirahat yang sangat mereka butuhkan. Rasa lelah yang menumpuk serta pikiran yang terus terbagi membuat performa di tempat kerja merosot drastis. Bagi pemberi kerja, penurunan fokus dan keterlambatan ini sering kali dilihat sebatas tindakan indisipliner, tanpa mau memahami beban psikologis berat yang sedang dipikul oleh pekerjanya di rumah. Pemecatan yang dialami suami korban menjadi bukti nyata betapa konflik pertanahan dapat menumbangkan ketahanan ekonomi sebuah keluarga dalam sekejap. Kehilangan pekerjaan tetap memaksa mereka terlempar ke dalam siklus kerentanan baru yang lebih menghimpit. Dengan berpindah menjadi buruh lepas, pendapatan yang tadinya bisa diandalkan untuk menopang kebutuhan bulanan kini berubah menjadi ketidakpastian harian tergantung pada ada atau tidaknya tawaran kerja yang datang.

Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang sangat menyiksa bagi warga terdampak. Energi dan perhatian yang seharusnya bisa digunakan untuk mencari peluang kerja yang lebih baik atau memperbaiki taraf hidup, justru habis terkuras hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari dan mempertahankan ruang hidup mereka. Pada akhirnya, warga Bara-Baraya tidak hanya dipaksa bertarung di ruang sengketa hukum untuk menyelamatkan tanah mereka, tetapi juga harus berjuang

habis-habisan di ruang domestik agar dapur mereka tetap bisa melanjurkan hidup.

Berdasarkan uraian dampak multidimensional tersebut, terlihat jelas bagaimana ancaman penggusuran menciptakan efek domino yang saling terikat—dimulai dari tekanan psikologis, kelumpuhan aktivitas ekonomi mikro, hingga kemerosotan kesejahteraan warga secara menyeluruh. Untuk mempermudah pemahaman mengenai alur keterkaitan kausal antar-variabel tersebut, mekanismenya disajikan secara sistematis melalui bagan berikut.



Berdasarkan dari tekanan psikologis yang berlarut-larut dan disrupsi mata pencaharian harian pada akhirnya berdampak langsung pada kemerosotan kesejahteraan hidup (well-being) warga secara multidimensional. Kesejahteraan masyarakat perkotaan tidak hanya diukur dari kecukupan finansial semata, melainkan dari keberlanjutan fungsi fisik, stabilitas mental, dan keharmonisan sosial yang saling menopang (McGillivray, 2007; OECD, 2020). Ketika ancaman penggusuran merusak rasa aman (sense of security) dan menghentikan perputaran ekonomi mikro warga, struktur kesejahteraan harian yang telah dibangun selama bertahun-tahun merosot secara drastis. Gangguan pada salah satu pilar kehidupan ini memicu efek domino yang meruntuhkan kapasitas adaptasi serta daya tahan (resilience) rumah tangga miskin perkotaan dalam menghadapi guncangan hidup (Moser, 1998; Bebbington, 1999).

KESIMPULAN

Sengketa lahan di Bara-Baraya, Makassar, membuktikan bahwa konflik pertanahan perkotaan tidak sekadar masalah administrasi klaim hukum formal atau sengketa nilai ganti rugi material semata, melainkan manifestasi dari benturan struktural yang secara aktif merusak fondasi kehidupan masyarakat kelas bawah. Melalui pendekatan ekonomi politik dan psikologi lingkungan,

fenomena ini mengonfirmasi bahwa ancaman penggusuran bekerja sebagai stresor lingkungan kronis (chronic environmental stressor) yang melumpuhkan kapasitas kognitif, menghentikan akumulasi modal usaha mikro, menurunkan produktivitas kerja harian, serta mengikis modal sosial yang menopang ketahanan ekonomi informal warga. Kumulasi dari tekanan psikologis dan disrupsi ekonomi harian tersebut pada akhirnya bermuara pada kemerosotan kesejahteraan hidup (well-being) secara multidimensional, yang termanifestasi dalam bentuk penyakit psikosomatis, pembengkakan pengeluaran medis, serta keterjeratan warga ke dalam spiral kemiskinan struktural baru (new urban poverty). Oleh karena itu, penataan ruang perkotaan di Kota Makassar memerlukan pergeseran paradigma mendasar dari orientasi komodifikasi modal spekulatif menuju pemenuhan keadilan spasial (spatial justice), di mana pemerintah daerah dan pemangku kebijakan wajib menghadirkan jaminan kepastian hak atas tanah serta perlindungan psikososial demi menjaga keberlanjutan ruang hidup dan kesejahteraan masyarakat.

REFRENSI

Altman, I., & Low, S. M. (Eds.). (1992). Place attachment. Plenum Press.

Batubara, B., & Rachman, N. F. (2022). Urban land grabbing and the production of space in Indonesian cities. Journal of Peasant Studies, 49(3), 512–534.

Bebbington, A. (1999). Capitals and capabilities: A framework for analyzing peasant viability, rural livelihoods and poverty. World Development, 27(12), 2021–2044.

Brunner, E., & Marmot, M. (2006). Social organization, stress, and health. In M. Marmot & R. G. Wilkinson (Eds.), Social Determinants of Health (2nd ed., pp. 6–30). Oxford University Press.

Chambers, R., & Conway, G. (1992). Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century(IDS Discussion Paper 296). Institute of Development Studies.

Conger, R. D., Conger, K. J., & Martin, M. J. (2010). Socioeconomic status, family processes, and individual development. Journal of Marriage and Family, 72(3), 685–704.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K. (2017). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. Routledge.

Desmond, M., & Kimbro, R. T. (2015). Eviction's fallout: Housing, hardship, and health in five cities. Social Forces, 94(1), 295–324.

DFID. (1999). Sustainable livelihoods guidance sheets. Department for International Development.

Ellis, F. (2000). Rural livelihoods and diversity in developing countries. Oxford University Press.

Evans, G. W., & Cohen, S. (1987). Environmental stress. In D. Stokols & I. Altman (Eds.), Handbook of Environmental Psychology (Vol. 1, pp. 571–610). John Wiley & Sons.

Fullilove, M. T. (2004). Root shock: How tearing up city neighborhoods hurts America, and what we can do about it. One World/Ballantine Books.

Gifford, R. (2014). Environmental psychology: Principles and practice (5th ed.). Optimal Books.

Gilbert, A. (2007). The return of the slum: Does language matter? International Journal of Urban and Regional Research, 31(4), 697–713.

Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford University Press.

Harvey, D. (2008). The right to the city. Verso Books.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing Company.

Lees, L., Shin, H. B., & López-Morales, E. (2016). Planetary gentrification. Polity Press.

Lefebvre, H. (1991). The production of space (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell.

Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty impedes cognitive

function. Science, 341(6149), 976–980.
Massey, D. S. (1990). American apartheid: Segregation and the making of the underclass. Harvard University Press.
McGillivray, M. (Ed.). (2007). Human well-being: Concept and measurement. Palgrave Macmillan.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Moser, C. O. (1998). The asset vulnerability framework: Reassessing urban poverty reduction strategies. World Development, 26(1), 1–19.
Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.). Pearson.
OECD. (2020). How's life? 2020: Measuring well-being. OECD Publishing.
Rachman, N. F. (2017). Land grabbing dan pembangunan berkeadilan. Pustaka Obor Indonesia.
Relph, E. (1976). Place and placelessness. Pion.
Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis (IDS Working Paper 72). Institute of Development Studies.
Selye, H. (1956). The stress of life. McGraw-Hill.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
Smith, N. (1979). Toward a theory of gentrification a back to the city movement by capital, not people. Journal of the American Planning Association, 45(4), 538–548.
Smith, N. (1987). Gentrification and the rent gap. Annals of the Association of American Geographers, 77(3), 462–465.
Smith, N. (1996). The new urban frontier: Gentrification and the revanchist city. Routledge.
Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, S. (2012). The effects of location and sectoral components of economic growth on poverty: Evidence from Indonesia. Journal of Development Economics, 98(2), 209–217.
Wacquant, L. (2008). Urban outcasts: A comparative sociology of advanced marginality. Polity Press.
Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. The World Bank Research Observer, 15(2), 225–249.
Xu, K., Evans, D. B., Kawabata, K., Zeramdini, R., Klavus, J., & Murray, C. J. (2003). Household catastrophic health expenditure: A multicountry analysis. The Lancet, 362(9378), 111–117.
Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.